

**PEMBERITAAN KORAN TENTANG PERISTIWA 27 JULI 1996
(KOMPAS DAN SUARA KARYA)**

EKO NURUL AKBAR
Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
Email:ekonurulakbar@gmail.com

Agus Trilaksana
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pers merupakan media yang memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pada masa orde baru pers terbagi menjadi dua yakni pro dan kontra terhadap jalannya pemerintahan. Mayoritas pers pada saat itu memilih untuk bersikap pro terhadap pemerintahan. Pembredelan yang dilakukan oleh Menteri Penerangan menjadi alasan utama hanya segelintir pers yang bersikap kontra dengan pemerintah. Berdasarkan analisis terhadap pemberitaan peristiwa 27 Juli 1996 terdapat perbedaan sudut pandang antara Kompas dengan Suara Karya dalam memberitakan peristiwa tersebut.

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pemberitaan koran Kompas dan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996 2) Mengapa ada perbedaan pemberitaan antara koran Kompas dan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996 3) Bagaimana dampak keberanian pemberitaan Kompas berbeda dengan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana pemberitaan koran Kompas dan Suara karya terkait peristiwa 27 Juli 1996, Untuk menganalisis mengapa terjadi perbedaan pemberitaan antara koran Kompas dan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996. Dan untuk menjelaskan dampak keberanian pemberitaan Kompas berbeda dengan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk dapat memperoleh hasil yang baik pada skripsi ini penulis melakukan penelusuran arsip berupa koran-koran terbitan Kompas dan Suara Karya pada tahun 1996, penelusuran buku-buku terkait kehidupan pers pada masa orde baru maupun peristiwa 27 Juli 1996, serta penelusuran jurnal-jurnal ilmiah, skripsi maupun majalah terkait pers dan seputar kerusuhan tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama ada perbedaan dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 antara Kompas dan Suara Karya, perbedaannya terletak pada pemberitaan Kongres Medan, mimbar bebas, pelaku peristiwa 27 Juli 1996, dan hukuman terhadap pelaku peristiwa 27 Juli 1996. Kedua faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 yakni pemilik media pers, independensi serta kepentingan Kompas dan Suara Karya yang saling bertentangan, Kompas yang didirikan oleh Jacob Oetama dan PK. Ojong cenderung memiliki hubungan politik dengan Megawati Soekarnoputri yang berusaha melengserkan pemerintahan orde baru, berbeda dengan Suara Karya yang didirikan oleh tokoh-tokoh muda Partai Golkar cenderung memiliki hubungan politik dengan pemerintahan, tujuan utama pers ini untuk mempertahankan rezim orde baru yang otoriter. Ketiga perbedaan pemberitaan Kompas dengan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996 berdampak kepada oplah Kompas yang semakin meningkat secara signifikan, hal ini disebabkan pada peristiwa 27 Juli 1996 Kompas selalu memposisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya sehingga mudah untuk mendapat simpatik masyarakat, bertambahnya pembaca terhadap harian Kompas terkait peristiwa tersebut membuat pers ini mampu mendominasi pasar informasi pada saat itu dengan memperoleh oplah terbanyak diantara pers lainnya.

Kata Kunci: *Pers Kompas, Pers Suara Karya, Peristiwa 27 Juli 1996.*

Abstract

Mass media is media that have function to submit information to society without existence of intervention on one's part any. At a period of mass media new order divided become two namely pros and contra to the way government. Mass media Majority at that moment select to behave pros to government. Bans that conducted by Minister of Information become main reason only a handful mass media that behave contra with government. Base analysis to reporting event 27 July 1996 are existed viewpoint difference between Kompas by ear creation in reporting on event is referred as.

Base background problem is referred as, then formula of research internal issue this is the as follows: 1) How reporting Kompas newspaper and Suara Karya newspaper relate event 27 July 1996 2) Why there is difference reporting between Kompas newspaper and Suara Karya newspaper related event 27 July 1996 3) How bravery impact reporting Kompas differs from Suara Karya newspaper relates event 27 July 1996. Intention of research this is the to explains how

reporting Kompas newspaper and Suara Karya newspaper relates event 27 July 1996, To analyse why happened difference reporting between Kompas newspaper and Suara Karya newspaper related event 27 July 1996. And to explain bravery impact reporting Kompas differs from Suara Karya newspaper relates event 27 July 1996.

This Research uses method of history research that cover heuristic, criticism, interpretation, and historiografi. To be able to getting the good result at this essay writer conducts search archives of have the shape of newspapers of Kompas derivative and Suara Karya newspaper in 1996, search books relates mass media life at a period of new order and also event 27 July 1996, and search erudite journals, essay and also magazine relates mass media and in around riot is referred as.

This research Result concludes as follows. First there is difference in reporting on event 27 July 1996 between Kompas and Suara Karya newspaper, its difference lay ins reporting Congress Medan, free tribune, event perpetrator 27 July 1996, and penalization to event perpetrator 27 July 1996. Second cause factors the happening of difference in reporting on event 27 July 1996 namely owner of mass media media, independency and Kompas importance and Suara Karya newspaper that each other interfere in, Kompas that founded by Jacob Oetama and PK. Ojong tends to have political relation/link with Megawati Soekarnoputri that try depose new order government, differ from Suara Karya newspaper that founded by young figures Golkar Party tends to have political relation/link with government, this mass media main purpose to maintain autoritary new order regime. The three of difference reporting Kompas by ear creation relates event 27 July 1996 affect to circulation Kompas that growing level in significant, this condition are caused in event 27 July 1996 Kompases always position Megawati as the party that maltreated until easy to get sympathetic society, increasing reader to daily Kompas relates event is referred as made this mass media can predominate information market at that moment with getting the most at most circulation range from to other mass media.

Keyword : Kompas Mass media, Suara Karya newspaper Mass media, Event 27 July 1996.

PENDAHULUAN

Pers merupakan media yang berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat agar dapat dikritisi dan dikoreksi secara bersama-sama tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta menjunjung tinggi objektivitas dan jika subjektif maka harus rasional.¹ Pers dalam perjalanannya dibedakan menjadi dua bagian yakni pro, dan kontra terhadap pemerintahan yang berkuasa, peran pemimpin redaksi sedikit banyak mempengaruhi arah visi dan misi pemberitaan dalam media massa pers tertentu. Hal yang demikian karena sebelum koran harian diterbitkan dan diedarkan pada masyarakat harus melalui proses koreksi oleh pemimpin redaksi agar memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan.

Kompas terbit pertama kali di Jakarta pada 28 Juni 1965, tepat ketika suasana politik sedang bergejolak terkait peristiwa pemberontakan PKI yang mengancam kestabilan pemerintahan. Kantor redaksi Kompas awalnya masih menumpang pada rumah Jakob Oetama yang kemudian pindah tempat di kantor redaksi *intisari* percetakan PT Kinta dengan kondisi masih menumpang. Kompas terlahir tepat pada kondisi ketika “politik menjadi panglima”. Kondisi yang mengharuskan setiap surat kabar agar berafiliasi dengan partai politik yang ada, maka dengan pertimbangan yang matang diputuskan bahwa Kompas berafiliasi dengan Partai Katolik di bawah pimpinan IJ. Kasimo.²

Suara Karya terbit untuk pertama kalinya pada 11 Maret 1971, harian ini diterbitkan dari hasil pemikiran para tokoh-tokoh muda Partai Golkar yang

ingin melupakan masa gemilang Orde Lama serta mempropagandakan rezim Orde Baru. Tokoh yang sangat berpengaruh terhadap terbitnya harian ini adalah Sumiskun, kepemimpinan redaksi harian Suara Karya banyak mengalami pergantian pimpinan, tercatat sebanyak empat kali yakni Jamal Ali, Rahman Tolleng, Djafar Assegaff dan Syamsul Bisri. Namun pergantian pimpinan redaksi tersebut tidak berpengaruh besar terhadap visi dan misi Suara Karya untuk mendukung seluruh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu Suara Karya sering disebut “korannya pemerintah”.

Penelitian ini lebih memfokuskan pengkajian pada dua koran era orde baru yang saling bertentangan, yaitu Kompas dan Suara Karya. Rezim Orde Baru ketika berkuasa di Indonesia sangat selektif dan bertindak represif pada media massa yang terlalu mengkritisi jalannya pemerintahan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan visi dan misi Kompas di bawah pimpinan PK Ojong dan Jakob Oetama. Kedua tokoh pendiri Kompas ini memiliki pandangan bahwa tugas utama pers ialah mengontrol dan mengkritisi pemerintah secara tajam jika memang diperlukan, juga untuk menyadarkan pemerintah bahwa dalam segala pelaksanaan kebijakan-kebijakannya selalu ada kontrol sosial yang mengawasinya yakni media pers.³

Pembredelan pada rezim orde baru menjadi ancaman yang serius kepada media pers pada saat itu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan sudut pandang Kompas dengan Suara Karya dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996, sehingga akan diketahui dampak kepada Kompas

¹ Sirikit, Syah. 2014. *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media Sorotan Atas Produk dan Perilaku Media di Era Demokrasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm 241.

² Ibid. Hlm 50.

³ Rizal, Mallarangeng. 2010. *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: PT Gramedia. Hlm 52.

yang berani berbeda dalam memberitakan peristiwa tersebut. Batasan masalah yang diambil adalah secara spasial hanya membahas mengenai perbedaan sudut pandang Kompas dan Suara Karya dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996, sedangkan secara temporal mengambil batasan pada tahun 1996 yaitu ketika terjadinya peristiwa 27 Juli 1996.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemberitaan koran Kompas dan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996?
2. Mengapa ada perbedaan pemberitaan antara koran Kompas dan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996?
3. Bagaimana dampak keberanian pemberitaan Kompas berbeda dengan Suara Karya terkait peristiwa 27 Juli 1996?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah maka untuk mencapai penulisan sejarah upaya yang peneliti lakukan untuk mengkaji dan merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti melalui metode sejarah. Penulisan ini sangat diperlukan suatu perangkat prinsip atau penulisan yang disebut metode penulisan sejarah. Proses penulisan ini terdiri dari empat tahapan yaitu *heuristik, kritik, interpretasi*, dan tahap akhir yaitu *historiografi*.

Langkah pertama yaitu *heuristik*, pada 12 November 2014 merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan. Sumber-sumber yang diperlukan adalah sumber utama maupun sumber pendukung. Studi ini sebagian besar didasarkan atas sumber-sumber utama berupa koran dan majalah, sumber-sumber koran dan majalah yang telah didapatkan peneliti diantaranya adalah koran terbitan *Kompas* dan *Suara Karya* serta *Majalah Tempo* dan *Majalah Gatra* yang memaparkan pemberitaan terkait peristiwa 27 Juli 1996.

Selain sumber-sumber primer tersebut, sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku-buku terkait seputar peristiwa yang terjadi pada Sabtu 27 Juli 1996 serta situasi dan kondisi media pers yang selalu dikontrol pada rezim Orde Baru. Peneliti mendapatkan sumber utama maupun sumber pendukung tersebut di beberapa tempat seperti Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) di Jakarta, Perpustakaan Kota Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan Perpustakaan Universitas Airlangga, serta toko-toko penjual buku langka di Surabaya.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ini adalah melakukan kritik sumber yang terbagi menjadi 2 yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menguji keaslian sumber secara fisik dengan cara tipologi, stratifikasi, dan kimiawai, sedangkan kritik intern bertujuan untuk menguji kredibilitas dari isi sumber tersebut mampu

dipertanggung jawabkan atau tidak. Pada penelitian ini penulis menggunakan kritik intern karena subjek yang diteliti merupakan sebuah peristiwa yang memerlukan sumber utama berupa arsip dan sumber pendukung seperti buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang sedang diteliti.

Tahap selanjutnya ialah interpretasi sumber yaitu melakukan eksplanasi fakta dengan menghubungkan antar fakta dan menganalisisnya untuk disusun secara kronologis dalam rangka merekonstruksi kembali peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Pendekatan ilmu bantu bertujuan untuk membantu merekonstruksi hasil eksplanasi fakta menjadi sebuah cerita yang menarik. Hasil rekonstruksi fakta yang telah disusun lalu kemudian ditulis sebagai historiografi yang menarik.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Pers

Rezim Orde Baru telah mengingkari kebebasan pers yang sebenarnya sudah tercantung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal 28 yang menyatakan "*kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang*".⁴ Hal yang demikian menjadi bukti bahwa pemerintah melawan hukum dengan banyaknya terjadi pembredelan beberapa media massa yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diterapkannya.

Undang-undang pers mengatakan bahwa setiap orang Indonesia yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti kemampuan dalam bidang jurnalistik maupun modal yang harus mencukupi dana operasionalnya berhak menerbitkan surat kabar. Namun untuk mendirikan sebuah media pers di Indonesia harus menyampaikan permohonan SIUPP, STT, serta harus memperoleh SIC sebagai bukti keabsahannya.⁵

Kebijakan terkait perijinan pendirian surat kabar tersebut nyatanya mampu meminimalisir terbitnya pers yang diprediksikan akan memberikan gangguan terhadap jalannya pemerintahan. Hampir sebagian besar pers yang mendapat izin untuk terbit menjadi tunduk terhadap intruksi-intruksi pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap pers berjalan tampak sesuai dengan rencana hingga sebelum kemunculan Kompas sebagai salah satu pers di Indonesia.

Kemunculan Kompas nampaknya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah, pers yang didirikan oleh P.K Ojong dan Jacob Oetama ini memiliki prinsip idealisme yang kuat sehingga tidak mudah diintervensi oleh pemerintah. Kedua tokoh ini ingin menjadikan Kompas sebagai media pers yang

⁴ David, T Hill. 1994. *The Pers in New Order Indonesia*. Asia Research Centre on Social, Politik and Economic Change Hlm 1.

⁵ Rezim Orde Baru menerapkan aturan terkait pers yang cukup ketat seperti ketika ingin mendirikan sebuah harian surat kabar maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), harus mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STT) jika ingin diakui keberadaannya oleh pemerintah, serta untuk menerbitkan berita wajib mendapatkan Surat Ijin Cetak (SIC) dari Departemen Penerangan.

relatif objektif dalam setiap pemberitaan terbitannya. Namun keinginannya tersebut sempat diragukan akan berhasil, hal ini tidak terlepas dari aturan pemerintah yang ketat terkait pendirian surat kabar di Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua media pers harus berafiliasi dengan Partai Politik yang telah ada di Indonesia. Hal yang demikian menjadikan Kompas pada akhirnya memilih berafiliasi dengan Partai Katolik pimpinan IJ. Kasimo. Pemilihan Partai Katolik tidak terlepas dari sisi religius yang kental pada partai ini diharapkan mampu menjadi pelindung dari upaya intervensi dan indoktrinasi oleh pemerintah.

Partai Katolik yang kental dengan sisi religiusnya ini ternyata bisa sesuai dengan harapan Kompas, dalam perkembangannya mampu menghindarkan Kompas dari intervensi politik pemerintah. Partai ini mengajarkan untuk selalu bertindak jujur, adil dan kritis terhadap siapapun yang menimbulkan dampak negatif terhadap khalayak umum, hal inilah yang menjadi landasan visi dan misi Kompas untuk selalu bersikap rasional dan objektif dalam setiap pemberitaan yang diterbitkannya.

Pemerintahan Orde Baru yang menerapkan beberapa kebijakan yang terkait media pers di Indonesia terus berupaya untuk meminimalisir berdirinya pers yang akan membahayakan pemerintahan. Indonesia menganut demokrasi pancasila sebagai haluan politik pada saat itu, oleh karena itu pemerintah mewajibkan pers untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pemerintahan Orde Baru menyebutnya sebagai pers pancasila.

Pers Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah tentunya berbeda dengan sistem pers yang sebelumnya seperti pers merdeka (1945-1959) dan pers terpimpin (1959-1966). Pers Pancasila merupakan gabungan dari kedua sistem pers yang telah ada sebelumnya, sistem pers ini menekankan kepada kebebasan untuk menyatakan pendapat namun harus mampu bertanggung jawab atas pendapatnya tersebut. Namun bertanggung jawab menurut pandangan pemerintahan saat itu yakni bertanggung jawab kepada pemerintah orde baru bukan terhadap rakyat.

Pers Pancasila yang diharapkan oleh masyarakat bisa bebas menyatakan pendapat berupa kritik maupun saran nampaknya jauh berbeda dengan realitas yang terjadi. Pemerintah terkesan tidak ingin melepaskan kontrolnya terhadap pers. Pembredelan senantiasa menjadi ancaman yang mampu menutup ruang gerak pers sebagai media yang menyampaikan informasi terhadap para pembacanya. Dampak nyata yang terjadi ialah sedikitnya pemberitaan yang terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya memberikan dampak negatif kepada rakyat.

B. Pers Sebagai Mata dan Telinga Rakyat

Pers yang selalu dikontrol pemerintah mulai mendapatkan dukungan dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat kelas menengah ke bawah mulai muncul kesadaran akan kebutuhan informasi dari media

massa baik cetak maupun elektronik. Masyarakat menginginkan media pers di Indonesia harus lebih objektif dalam menerbitkan sebuah berita.

Masyarakat kelas menengah yang diwakili oleh editor ternama Goenawan Mohamad melakukan tuntutan terhadap Menteri Penerangan dengan menempuh uji publik serta uji yudisial apakah Menteri Penerangan memiliki kewenangan konstitusional untuk membredel beberapa media massa seperti Majalah Tempo pada bulan Juni 1994. Tekanan semakin menguat mempertanyakan akuntabilitas Menteri Penerangan yang sudah semakin diluar batas kewenangannya.⁶

Ketika berbicara terkait media pers yang berjaya pada era orde baru, fakta di lapangan menyatakan Kompas sebagai media pers yang cukup laris di pasaran. Keinginan kuat dari media ini untuk bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi politik dari pihak-pihak tertentu menjadi faktor kesuksesan Kompas. Tindakan Kompas untuk tampil berbeda dengan pers lainnya serta selalu mengedepankan rasionalitas serta objektifitas membuat masyarakat lebih tertarik untuk membaca, hal ini tentu berdampak positif terhadap oplah yang semakin meningkat.

Tahun 1991 kemajuan tingkat pembaca yang sadar terhadap pentingnya informasi mulai adanya peningkatan yang signifikan, pada tahun tersebut sudah mencapai 13 juta per eksemplar. Hal ini tidak terlepas dari budaya membaca yang mengalami peningkatan, karena membeli surat kabar atau majalah menjadi aktivitas perkotaan di Indonesia walaupun masih dalam skala rendah dan bersifat minoritas, yang demikian itu juga tidak bisa dipungkiri karena masih adanya pembatasan-pembatasan politik dari pemerintah yang mulai merasa khawatir terhadap perkembangan pers yang semakin mengancam kekuasaannya.

C. Pemberitaan Kompas Terkait Peristiwa 27 Juli 1996

Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 merupakan peristiwa penting di Indonesia. Kerusuhan tersebut menjadi sorotan utama pers yang bersaing untuk menyajikan pemberitaan terkait kerusuhan, tidak terkecuali Kompas. Pada saat itu pers ini mulai mendapat kepercayaan dan simpatik rakyat untuk memberikan informasi yang akurat mengenai peristiwa 27 Juli 1996. Berikut ini cuplikan berita terkait peristiwa 27 Juli 1996 yang diterbitkan oleh Kompas:

Usai Diterima Presiden, Soerjadi Mempercepat Proses Konsolidasi.

“Seusai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia hasil Kongres Medan 20-22 Juni 1996 Soerjadi diterima Presiden Soeharto, Kamis (25/7), Soerjadi serta rekan-rekan pengurus partai akan segera mempercepat proses konsolidasi. Proses konsolidasi ini diharapkan mampu menyatukan

⁶ David, T Hill. 1994. *The Pers in New Order Indonesia*. Asia Research Centre on Social, Politik and Economic Change. Hlm 4.

dukungan terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia yang baru.⁷

Kassospol ABRI: ABRI Minta PDI Hentikan Mimbar Bebas

“Letjen TNI Syarwan Hamid menyatakan mimbar bebas akan membahayakan kestabilan negara karena dalam kegiatan tersebut hanya berisikan aktivitas untuk menyuarakan kritik tajam kepada pemerintah orde baru tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat, oleh sebab itu para pihak yang terlibat dalam mimbar bebas akan dijerat undang-undang subversif”.⁸

Soerjadi Tidak Setuju “Status Quo”

“Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia hasil Kongres Medan 20-22 juni 1996, Soerjadi, tidak sepakat dengan adanya usul status quo kepada PDI sampai ada keputusan dari pengadilan tentang penetapan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia yang sah menurut hukum”.⁹

Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid: Beri Kesempatan Soerjadi Untuk Lakukan Pendekatan

“Letkol Syarwan Hamid menginginkan agar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia hasil Kongres Medan 20-22 Juni 1996 diberikan kesempatan untuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan kemelut di tubuh PDI”.¹⁰

Soerjadi Dekati Penentang Kongres PDI Medan

“Mayoritas DPC PDI yang menolak Kongres Medan dan konsisten mendukung Megawati telah menyusun Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk disetor kepada pemerintah melalui Mendagri. Sementara kubu Soerjadi mengklaim juga melakukan aktivitas serupa bahkan Soerjadi mengklaim formulir DCS telah dibagikan ke cabang-cabang PDI di daerah-daerah, padahal DPP PDI di daerah-daerah telah serentak memutuskan untuk tidak mengakui fungsionaris PDI pimpinan Soerjadi hasil Kongres Medan”.¹¹

Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli

“Pemerintah akan terus melakukan berbagai bentuk tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan 27 Juli 1996 bagi yang terlibat

langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Pelaku kerusuhan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia”.¹²

Pembuat Kerusuhan 27 Juli Sebaiknya Dijerat KUHP

“Anggota Komnas HAM Albert Hasibuan mengutarakan bahwa para pelaku atau pembuat kerusuhan 27 Juli 1996 sebaiknya dituntaskan secara hukum dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), karena penggunaan UU Subversif menurutnya tidak tepat”.¹³

D. Pemberitaan Suara Karya Terkait Peristiwa 27 Juli 1996

Suara Karya yang didirikan oleh kaum muda Partai Golkar ternyata ingin memberitakan hal yang sama dengan Kompas namun dengan sudut pandang yang berlawanan. Suara Karya sebagai “korannya pemerintah” berinisiatif memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 dengan sudut pandang yang cenderung pro-pemerintah, sehingga pemberitaannya selalu memosisikan pemerintah sebagai pihak yang benar terhadap peristiwa tersebut. Berikut ini beberapa cuplikan berita terkait peristiwa 27 Juli 1996 yang diterbitkan Suara Karya:

Soerjadi Siap Kerja Sama dengan Megawati

“Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia hasil kongres IV di Medan Soerjadi menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Megawati Soekarnoputri untuk menuntaskan berbagai persoalan PDI. Namun secara tegas nama Megawati Soekarnoputri tidak bisa dimasukkan dalam susunan fungsionaris DPP PDI di bawah pimpinan Soerjadi”.¹⁴

Soerjadi Harapkan Megawati Ikhlas Beri Kesempatan Kepada DPP PDI Hasil Kongres
“Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia hasil kongres IV di Medan Soerjadi berharap kubu DPP PDI Megawati hendaknya ikhlas memberikan kesempatan kepada DPP PDI hasil kongres untuk menjalankan roda organisasi. Soerjadi juga menegaskan tidak pernah ada dualisme kepemimpinan di tubuh PDI karena secara jelas dan tegas pemerintah mengakui asas legalitas DPP PDI hasil kongres”.¹⁵

PDI Harus Lebih Giat Lagi Lakukan Konsolidasi

⁷ Kompas. 27 Juli 1996. *Usai Diterima Presiden, Soerjadi Mempercepat Proses Konsolidasi*. Hlm 14 kolom 3.

⁸ Kompas. 21 Juli 1996. *Kassospol ABRI: ABRI Minta PDI Hentikan Mimbar Bebas*. Hlm 1 kolom 2.

⁹ Kompas. 19 Juli 1996. *Soerjadi Tidak Setuju “Status Quo”*. Hlm 1 kolom 3.

¹⁰ Kompas. 18 Juli 1996. *Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid: Beri Kesempatan Soerjadi Untuk Lakukan Pendekatan*. Hlm 1 kolom 6.

¹¹ Kompas. 17 Juli 1996. *Soerjadi Dekati Penentang Kongres PDI Medan*. Hlm 1 kolom 2.

¹² Kompas. 31 Juli 1996. *Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli*. Hlm 1 kolom 2.

¹³ Kompas. 31 Juli 1996. *Pembuat Kerusuhan 27 Juli Sebaiknya Dijerat KUHP*. Hlm 13 kolom 5.

¹⁴ Suara Karya. 28 Juli 1996. *Soerjadi Siap Kerja Sama dengan Megawati*. Hlm 1 kolom 3.

¹⁵ Suara Karya. 15 Juli 1996. *Soerjadi Harapkan Megawati Ikhlas Beri Kesempatan Kepada DPP PDI Hasil Kongres*. Hlm 1 kolom 8.

“Wakil Ketua Fraksi Golkar yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sundoro Samsuri mengatakan bahwa kendati Soerjadi beserta seluruh fungsionaris DPP Partai Demokrasi Indonesia telah diterima Presiden Soeharto, namun konsolidasi partai sesuai pesan presiden sebelumnya, harus terus dijalankan. Bahkan dengan diterimanya Soerjadi oleh presiden, seluruh fungsionaris DPP PDI hasil kongres harus lebih giat untuk melakukan konsolidasi partai hingga ke jajaran terbawah”.¹⁶

Pangab: Mimbar Bebas Gunakan Cara-Cara PKI

“Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung menilai ada tanda-tanda menjerus ke arah kegiatan yang berlandaskan komunisme dalam aksi mimbar bebas di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Untuk itu ABRI akan secepatnya mengambil tindakan untuk menghentikan aksi mimbar bebas itu”.¹⁷

DPP PDI Ambil Alih Kantor Jalan Diponegoro 58 Dengan Cara Apapun

“Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia hasil Kongres Medan Buttu Hutapea menyatakan pihaknya sudah habis kesabaran dan menilai sudah tidak bisa lagi dengan jalan halus mendekati kubu Megawati dalam soal kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Cepat atau lambat kami akan mengambil alih kantor DPP PDI dengan cara apapun”.¹⁸

Perintah Pangdam Jaya: Tembak Di Tempat Terhadap Perusuh

“Pangdam Jaya Mayjen TNI Soetiyoso selaku Ketua Bakorstanasda Jaya di Bekasi mengeluarkan perintah untuk tembak di tempat terhadap para perusuh, perintah ini diberikan karena akibat dari kerusuhan 27 Juli 1996 merusak puluhan bangunan dan kendaraan masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi kerusuhan”.¹⁹

Aparat Keamanan Sudah Cukup Bersabar

“Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid menyatakan bahwa aparat keamanan sudah cukup bersabar dan bersikap toleran dalam menangani dan mengatasi aksi kerusuhan yang terjadi tanggal 27 Juli 1996. Saat terjadi aksi kerusuhan tanggal 27 Juli 1996, tidak sebutir peluru pun ditembakkan oleh petugas keamanan meskipun

mereka dihujani dengan lemparan batu oleh perusuh”.²⁰

Struktur Partai Rakyat Demokratik Sama Dengan PKI

“Menko Polkam Soesilo Soedarman menegaskan dari jauh-jauh hari pemerintah sudah mengingatkan kemungkinan munculnya paham komunisme, seperti peringatan adanya OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) beberapa waktu lalu, kini sudah menjelma wujudnya dengan lahirnya Partai Rakyat Demokratik (PRD). Struktur organisasi ini jelas sama dengan struktur Partai Komunis Indonesia (PKI)”.²¹

Kerusuhan di Jakarta Ditanggapi PRD

“Presiden Soeharto menegaskan bahwa kerusuhan 27 Juli 1996 yang terjadi di Jakarta telah ditanggapi pihak ketiga yang memiliki kepentingan politik tertentu seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD). Menko Polkam Soesilo Soedarman mengklaim pihaknya telah menemukan dokumen-dokumen yang mampu menunjukkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) telah menunggangi kerusuhan 27 Juli 1996”.²²

Golkar Keccam Keras Pelaku Kerusuhan, MUI Minta Umat Tingkatkan Kewaspadaan

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengecam keras tindakan kebringasan dan kebrutalan yang dilakukan oleh oknum atau golongan yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan pada hari Sabtu 27 Juli 1996”.²³

Golkar Desak Pemerintah Menindak Tegas PRD dan Antek-anteknya

“Ketua Umum DPP Partai Golkar Harmoko menilai Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan organisasi haram dan tidak memiliki hak hidup di Indonesia. Karena selain tidak berasaskan Pancasila dan berentangan dengan Undang-undang”.²⁴

E. Perbedaan Pemberitaan Peristiwa 27 Juli 1996

Intervensi politik yang dilakukan oleh pemerintah orde baru terhadap konflik internal PDI semakin tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Perbedaan pemberitaan terkait konflik internal PDI hingga peristiwa 27 Juli 1996 oleh Kompas dan Suara Karya menjadi bukti awal untuk menguatkan dugaan keterlibatan pemerintah dan ABRI dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan fakta-fakta perbedaan sudut pandang Kompas dan Suara Karya

¹⁶ Suara Karya. 26 Juli 1996. *PDI Harus Lebih Giat Lagi Lakukan Konsolidasi*. Hlm 1 kolom 1.

¹⁷ Suara Karya. 26 Juli 1996. *Pangab: Mimbar Bebas Gunakan Cara-Cara PKI*. Hlm 1 kolom 7.

¹⁸ Suara Karya. 23 Juli 1996. *DPP PDI Ambil Alih Kantor Jalan Diponegoro 58 Dengan Cara Apapun*. Hlm 3 kolom 1.

¹⁹ Suara Karya. 31 Juli 1996. *Perintah Pangdam Jaya: Tembak Di Tempat Terhadap Perusuh*. Hlm 1 kolom 1.

²⁰ Suara Karya. 31 Juli 1996. *Aparat Keamanan Sudah Cukup Bersabar*. Hlm 1 kolom 5.

²¹ Suara Karya. 31 Juli 1996. *Struktur Partai Rakyat Demokratik Sama Dengan PKI*. Hlm 1 kolom 8.

²² Suara Karya. 30 Juli 1996. *Kerusuhan di Jakarta Ditanggapi PRD*. Hlm 1 kolom 1.

²³ Suara Karya. 30 Juli 1996. *Golkar Keccam Keras Pelaku Kerusuhan, MUI Minta Umat Tingkatkan Kewaspadaan*. Hlm 1 kolom 1.

²⁴ Suara Karya. 31 Juli 1996. *Golkar Desak Pemerintah Menindak Tegas PRD dan Antek-anteknya*. Hlm 1 kolom 1.

dalam memandang peristiwa 27 Juli 1996, maka bisa diklasifikasikan seperti berikut ini:

1. Perbedaan Pemberitaan Kongres Medan

Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI hasil Kongres Medan mendapatkan pengakuan asas legalitas dari Presiden Soeharto, sedangkan fungsionaris DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri tidak diakui asas legalitasnya oleh Presiden Soeharto meskipun terpilih dari hasil KLB 1993. Soerjadi berkeyakinan bahwa terpilihnya sebagai Ketua Umum PDI menggantikan Megawati telah sesuai hukum yang berlaku, terlebih lagi hasil Kongres Medan juga didukung oleh Dewan Pimpinan Rakyat. Hal yang demikian sesuai dengan pemberitaan dari Suara Karya. Berikut ini cuplikan berita terkait pengakuan hasil kongres Medan oleh Presiden :

PDI Harus Lebih Giat Lagi Lakukan Konsolidasi

*“Wakil Ketua Fraksi Golkar yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sundoro Samsuri mengatakan bahwa kendati Soerjadi beserta seluruh fungsionaris DPP Partai Demokrasi Indonesia telah diterima Presiden Soeharto, namun konsolidasi partai sesuai pesan presiden sebelumnya, harus terus dijalankan. Bahkan dengan diterimanya Soerjadi oleh presiden, seluruh fungsionaris DPP PDI hasil kongres harus lebih giat untuk melakukan konsolidasi partai hingga ke jajaran terbawah”.*²⁵

Pernyataan Wakil Ketua Fraksi Golkar tersebut menjadi bukti bahwa Presiden lebih memilih untuk memberikan asas legalitas terhadap fungsionaris DPP PDI pimpinan Soerjadi. Namun Kompas ternyata memilih untuk menerbitkan pemberitaan yang berbeda terkait hasil Kongres Medan yang menjadikan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang baru. Berikut ini cuplikan berita yang diterbitkan oleh Kompas terkait hasil Kongres Medan:

Soerjadi Dekati Penentang Kongres PDI Medan

*“Mayoritas DPC PDI yang menolak Kongres Medan dan konsisten mendukung Megawati telah menyusun Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk disetor kepada pemerintah melalui Mendagri. Sementara kubu Soerjadi mengklaim juga melakukan aktivitas serupa bahkan Soerjadi mengklaim formulir DCS telah dibagikan ke cabang-cabang PDI di daerah-daerah, padahal DPP PDI di daerah-daerah telah serentak memutuskan untuk tidak mengakui fungsionaris PDI pimpinan Soerjadi hasil Kongres Medan”.*²⁶

Pemberitaan Kompas tersebut tentu berbeda dengan dengan berita yang diterbitkan oleh Suara Karya yang notabeneanya merupakan korannya pemerintah. Kompas dalam pemberitaan tersebut menjelaskan bahwa kader-kader Dewan Pimpinan Cabang PDI yang berada di daerah-daerah serentak untuk mengambil keputusan menolak hasil Kongres Medan. Para kader-kader Partai Demokrasi Indonesia ini segera menyusun Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk diberikan kepada Mendagri sebagai bentuk keputusan yang menolak hasil Kongres Medan yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI yang baru.

2. Perbedaan Pemberitaan Mimbar Bebas

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konflik internal PDI memunculkan beragam reaksi dari masyarakat maupun dari kubu Megawati. Mayoritas berpendapat bahwa pemerintah harusnya tidak melakukan tindakan-tindakan intervensi yang akan semakin memperkeruh konflik yang sedang terjadi. Megawati Soekarnoputri pada akhirnya menyelenggarakan mimbar bebas sebagai bentuk protes atas dugaan keterlibatan pemerintah dalam masalah internal PDI. Mimbar bebas dijadikan sebagai sarana kepada masyarakat untuk menyuarakan kritik maupun saran terhadap penyelesaian konflik yang dikhawatirkan akan berkepanjangan ini.

Pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk menutup ruang terhadap rakyatnya dalam mengeluarkan aspirasi. Hal yang demikian tentu tidak akan bertahan lama, faktanya rakyat ternyata telah berani untuk menyuarakan pendapatnya atas intervensi pemerintah terhadap konflik internal PDI. Perlawanan rakyat dibuktikan dengan keterlibatan pada kegiatan mimbar bebas yang digagas oleh kubu Megawati Soekarnoputri.

Kompas dan Suara Karya ternyata memiliki sudut pandang yang berbeda dalam upaya memberitakan kegiatan mimbar bebas. Namun dalam pemberitaannya kali ini terkesan memiliki kesamaan yang menolak keberadaan mimbar bebas, hanya saja perbedaannya terletak pada cara pemberitaan peristiwa tersebut. Berikut ini cuplikan berita yang diterbitkan Kompas terkait pandangan terhadap mimbar bebas:

Kassospol ABRI: ABRI Minta PDI Hentikan Mimbar Bebas

*“Letjen TNI Syarwan Hamid menyatakan mimbar bebas akan membahayakan kestabilan negara karena dalam kegiatan tersebut hanya berisikan aktivitas untuk menyuarakan kritik tajam kepada pemerintah orde baru tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat, oleh sebab itu para pihak yang terlibat dalam mimbar bebas akan dijerat undang-undang subversif”.*²⁷

Pemberitaan ini ingin menjelaskan bahwa mulai muncul kekhawatiran pemerintah terhadap terlaksananya mimbar bebas. Ketakutan pemerintah tidak terlepas dari banyaknya pihak yang terlibat dalam

²⁵ Suara Karya. 26 Juli 1996. *PDI Harus Lebih Giat Lagi Lakukan Konsolidasi*. Hlm 1 kolom 1.

²⁶ Kompas. 17 Juli 1996. *Soerjadi Dekati Penentang Kongres PDI Medan*. Hlm 1 kolom 2.

²⁷ Kompas. 21 Juli 1996. *Kassospol ABRI: ABRI Minta PDI Hentikan Mimbar Bebas*. Hlm 1 kolom2.

mimbar bebas yang secara serentak mengkritisi upaya pemerintah yang diduga melakukan intervensi politik dalam konflik internal PDI.

Suara Karya sebagai korannya pemerintah tentu segera menerbitkan pemberitaan terkait mimbar bebas. Tindakan pers ini untuk membendung opini yang dibangun oleh kubu Megawati dalam upaya mengkritisi tindakan-tindakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Suara Karya ingin membentuk opini baru di masyarakat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan sesuai hukum. Berikut ini cuplikan berita yang diterbitkan Suara Karya terkait pandangannya terhadap mimbar bebas:

Pangab: Mimbar Bebas Gunakan Cara-Cara PKI

*“Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung menilai ada tanda-tanda menjerus ke arah kegiatan yang berlandaskan komunisme dalam aksi mimbar bebas di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Untuk itu ABRI akan secepatnya mengambil tindakan untuk menghentikan aksi mimbar bebas itu”.*²⁸

Berdasarkan isi dari berita tersebut, Suara Karya seakan ingin menjelaskan bahwa ABRI akan segera melakukan tindakan represif untuk menghentikan kegiatan mimbar bebas. Hal yang demikian berbeda dengan pemberitaan dari Kompas yang hanya ingin menggambarkan kekhawatiran dari pihak ABRI serta hanya memberikan himbauan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan mimbar bebas untuk segera berhenti. Namun Suara Karya menerbitkan pemberitaan yang berusaha menghasut masyarakat untuk tidak terlibat dalam mimbar bebas yang menurut pihak ABRI menggunakan cara-cara komunis. Pihak ABRI pun akan melakukan tindakan represif untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Berdasarkan pemberitaan kedua pers antara Kompas dengan Suara Karya dalam menyoro mimbar bebas terdapat sebuah perbedaan. Perbedaannya terletak pada cara memberitakan mimbar bebas dari kedua pers ini, Kompas lebih memilih untuk memberitakan dengan menggunakan kata-kata yang hanya untuk menghimbau masyarakat agar segera menghentikan kegiatan tersebut, hal ini agar konflik tidak semakin membesar. Pemberitaan Kompas tersebut berbeda dengan pandangan Suara Karya dalam memberitakan mimbar bebas yang terkesan bersifat indoktrinasi kepada masyarakat. Suara Karya dalam pemberitaannya menuduh bahwa kegiatan mimbar bebas menggunakan cara-cara PKI tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan.

3. Perbedaan Pemberitaan Pelaku Peristiwa 27 Juli 1996

Peristiwa 27 Juli menjadi peristiwa politik yang terjadi akibat dugaan keterlibatan pemerintah dalam

melakukan intervensi pada konflik internal PDI. Pasca penyerbuan massa kubu Soerjadi berakhir, semua pihak terkesan tidak ingin bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pemerintah maupun ABRI menegaskan bahwa tidak terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996. Upaya pemerintah untuk menguatkan pernyataan tersebut dengan cara menuduh tanpa bukti bahwa aktivis PRD merupakan pihak yang harus bertanggung jawab. Kompas dan Suara Karya ternyata memiliki pandangan yang berbeda dalam upaya mencari pelaku peristiwa itu.

Kompas yang dari awal menyatakan sikapnya untuk profesional dengan menerbitkan pemberitaan yang berbeda dengan berita yang diterbitkan oleh Suara Karya. Berikut ini cuplikan berita yang diterbitkan oleh Kompas terkait pelaku peristiwa 27 Juli 1996:

Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli

*“Pemerintah akan terus melakukan berbagai bentuk tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan 27 Juli 1996 bagi yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Pelaku kerusuhan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia”.*²⁹

Pemberitaan yang diterbitkan Kompas tersebut semakin menegaskan sikapnya untuk bersikap objektif dan tidak ingin gegabah dalam menuduh pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996. Kompas dalam pemberitaannya tersebut ingin menjelaskan bahwa sebaiknya pelaku dihukum sesuai KUHP yang berlaku di Indonesia, hal ini untuk menghindarkan para aktivis yang dituduh sebagai pelaku dari tindakan represif aparat keamanan. Berbeda dengan Suara Karya yang juga menerbitkan pemberitaan terkait upaya pencarian pelaku yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Berikut ini cuplikan berita terkait pandangan Suara Karya terhadap pihak yang dituduh sebagai pelaku peristiwa 27 Juli 1996:

Kerusuhan di Jakarta Ditunggangi PRD

*“Presiden Soeharto menegaskan bahwa kerusuhan 27 Juli 1996 yang terjadi di Jakarta telah ditunggangi pihak ketiga yang memiliki kepentingan politik tertentu seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD). Menko Polkam Soesilo Soedarman mengklaim pihaknya telah menemukan dokumen-dokumen yang mampu menunjukkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) telah menunggangi kerusuhan 27 Juli 1996”.*³⁰

Pernyataan Presiden Soeharto tersebut seakan menuduh tanpa bukti yang kuat, karena pada saat itu aktivis Partai Rakyat Demokratik baru menjalani proses pemeriksaan dari aparat keamanan. Pihak ABRI yang menangani peristiwa 27 Juli 1996 dengan memeriksa aktivis PRD yang diduga pelaku kerusuhan masih belum menyampaikan hasil pemeriksaan. Faktanya

²⁸ Suara Karya. 26 Juli 1996. *Pangab: Mimbar Bebas Gunakan Cara-Cara PKI*. Hlm 1 kolom 7.

²⁹ Kompas. 31 Juli 1996. *Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli*. Hlm 1 kolom 2.

³⁰ Suara Karya. 30 Juli 1996. *Kerusuhan di Jakarta Ditunggangi PRD*. Hlm 1 kolom 1.

Presiden Soeharto dan Menkopolkam menuduh aktivis PRD sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996 tersebut.

Pemberitaan Kompas terlihat sangat berbeda dengan pemberitaan Suara Karya dalam memandang upaya pencarian pelaku peristiwa 27 Juli 1996. Kompas dalam menyajikan pemberitaannya berusaha menjelaskan bahwa pemerintah akan mencari pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 27 Juli 1996 sesuai hukum yang berlaku. Berbeda dengan Suara Karya pada pemberitaannya yang dengan tegas menuduh tanpa bukti kepada para aktivis PRD sebagai pelaku peristiwa 27 Juli 1996.

Berdasarkan pemberitaan kedua media pers ini terlihat bahwa adanya perbedaan dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat sebagai pembaca. Suara Karya dengan dukungan pemerintah terkesan subjektif dan menggunakan kata-kata yang bersifat indoktrinasi yang akan memperkeruh konflik, namun berbeda dengan Kompas yang memilih untuk menggunakan kata-kata yang lebih bersifat objektif dan rasional agar tidak menambah permasalahan baru dalam penyelesaian kasus ini.

4. Perbedaan Pemberitaan Penetapan Hukuman Terhadap Pelaku Peristiwa 27 Juli 1996

Upaya pencarian pelaku peristiwa 27 Juli 1996 terkesan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa pihak yang memiliki kekuasaan, tanpa bukti yang bisa dipertanggung jawabkan menuduh pihak yang belum tentu bersalah untuk bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996. Dampak dari penuduhan tersebut menjadikan masyarakat mempertanyakan hukuman yang dituduhkan kepada aktivis Partai Rakyat Demokratik yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Kompas dan Suara Karya dalam menyikapi kasus ini memiliki pandangan yang berbeda atas hukuman yang harus diterima aktivis Partai Rakyat Demokratik yang dituduh sebagai pelaku kerusuhan. Kompas menerbitkan pemberitaan yang terlihat lebih logis dari pada pemberitaan Suara Karya yang terkesan tidak rasional menurut hukum. Berikut ini cuplikan berita yang diterbitkan Kompas terkait hukuman yang harus diterima pelaku peristiwa 27 Juli 1996:

Pembuat Kerusuhan 27 Juli Sebaiknya Dijerat KUHP

*“Anggota Komnas HAM Albert Hasibuan mengutarakan bahwa para pelaku atau pembuat kerusuhan 27 Juli 1996 sebaiknya dituntaskan secara hukum dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), karena penggunaan UU Subversif menurutnya tidak tepat”.*³¹

Pernyataan anggota Komnas HAM memang terlihat lebih bijaksana dari pada harus menghukum pihak yang belum tentu bersalah dengan sewenang-wenang. Pada saat itu hampir semua aktivis yang

mengkritisi pemerintah akan terkena undang-undang subversif. Namun kali ini menurut pemberitaan Kompas diharapkan pelaku peristiwa 27 Juli 1996 dihukum menurut pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberitaan Kompas tersebut segera “dilawan” dengan Suara Karya yang merupakan korannya pemerintah untuk menerbitkan pemberitaan yang berbeda dengan pemberitaan Kompas. Berikut ini cuplikan berita yang diterbitkan oleh Suara Karya terkait tindakan hukum yang harus diterima oleh pelaku peristiwa 27 Juli 1996:

Perintah Pangdam Jaya: Tembak Di Tempat Terhadap Perusuh

*“Pangdam Jaya Mayjen TNI Soetiyoso selaku Ketua Bakorstanasda Jaya di Bekasi mengeluarkan perintah untuk tembak di tempat terhadap para perusuh, perintah ini diberikan karena akibat dari kerusuhan 27 Juli 1996 merusak puluhan bangunan dan kendaraan masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi kerusuhan”.*³²

Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Suara Karya tersebut seakan mengesampingkan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai hukum yang berlaku aparat keamanan tidak diperkenankan menembak pihak yang belum tentu merupakan pelaku yang dicari. Namun pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Soetiyoso ingin menegaskan kembali posisinya sebagai pihak yang benar, hal yang demikian berdasarkan cuplikan berita berikut ini yang semakin menguatkan pernyataan pihak ABRI dalam upaya memposisikan sebagai pihak yang tidak pernah salah:

Aparat Keamanan Sudah Cukup Bersabar

*“Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid menyatakan bahwa aparat keamanan sudah cukup bersabar dan bersikap toleran dalam menangani dan mengatasi aksi kerusuhan yang terjadi tanggal 27 Juli 1996. Saat terjadi aksi kerusuhan tanggal 27 Juli 1996, tidak sebutir peluru pun ditembakkan oleh petugas keamanan meskipun mereka dihujani dengan lemparan batu oleh perusuh”.*³³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, para petinggi-petinggi ABRI terkesan ingin membentuk opini baru di masyarakat bahwa pihaknya selalu melakukan tindakan sesuai hukum dengan menembak di tempat para perusuh. Pihak perusuh tentunya ialah aktivis Partai Rakyat Demokratik yang telah dinyatakan sebagai pihak yang “mendalangi” peristiwa 27 Juli 1996 oleh Presiden Soeharto Hal yang demikian tentu sangat berbeda dengan pemberitaan dari Kompas yang menjelaskan bahwa para perusuh atau pelaku yang

³² Suara Karya. 31 Juli 1996. *Perintah Pangdam Jaya: Tembak Di Tempat Terhadap Perusuh*. Hlm 1 kolom 1.

³³ Suara Karya. 31 Juli 1996. *Aparat Keamanan Sudah Cukup Bersabar*. Hlm 1 kolom 5.

³¹ Kompas. 31 Juli 1996. *Pembuat Kerusuhan 27 Juli Sebaiknya Dijerat KUHP*. Hlm 13 kolom 5.

harus bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996 harus dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP.

Perbedaan pemberitaan terkait hukuman kepada pelaku peristiwa 27 Juli 1996 ini terletak pada cara masing-masing pers untuk menyajikan sebuah berita politik. Kompas menyoroti kasus ini ingin selalu bersikap rasional dan objektif, hal ini terlihat dari pemberitaannya yang menyarankan agar pelaku peristiwa 27 Juli 1996 dihukum berdasarkan KUHP. Berbeda dengan Suara Karya yang pada pemberitaannya terkesan ingin mengesampingkan hukum yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya aparat keamanan untuk menembak para perusuh tanpa melalui proses penyelidikan lebih lanjut.

F. Analisis Mengapa Terjadi Perbedaan Pemberitaan Peristiwa 27 Juli 1996

Pers yang berada pada masa orde baru tidak bisa secara bebas dalam hal menyuarakan pendapat bahkan kritiknya terhadap pemerintah saat itu. Pemerintah juga selalu mengandalkan aparat keamanan yang tergabung dalam kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai “eksekutor” di lapangan.

Kompas dan Suara Karya memiliki perbedaan sudut pandang dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996. Pemberitaan Kompas terlihat relatif objektif dari pada Suara Karya yang selalu mendukung keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Berdasarkan perbedaan pemberitaan tersebut, berikut ini analisis yang mengklasifikasikan faktor-faktor terjadinya perbedaan tersebut:

1. Pemilik Media Pers

Kompas yang didirikan oleh PK. Ojong dan Jacob Oetama dari awal menegaskan sikapnya untuk menjadi pers profesional. Hal tersebut didukung dengan faktor ekonomi yang kuat untuk menunjang dana operasional pers Kompas dalam bidang jurnalistik. Berbeda dengan Suara Karya yang didirikan oleh kaum muda Partai Golkar yang memiliki tujuan menjadi sarana komunikasi pemerintah dengan rakyat. Pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya memanfaatkan keberadaan Suara Karya untuk mendukung kebijakan tersebut dengan cara membangun opini positif di masyarakat, untuk itulah Pers ini sering disebut sebagai korannya pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Kompas dan Suara Karya. Kompas memiliki prinsip idealisme yang kuat agar tidak mudah diintervensi oleh pihak lain, hal ini dibuktikan dengan pemberitaan yang selama ini diterbitkan oleh Kompas selalu relatif objektif. Pada masalah konflik internal yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia hingga terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 Kompas selalu memberitakan dengan mengedepankan sisi rasionalitas dan objektifitasnya. Ternyata dalam perjalanan Kompas muncul fakta-fakta baru yang menjelaskan bahwa pers ini nampaknya memiliki hubungan yang erat dengan Megawati, hal ini tidak terlepas dari dugaan adanya satu misi yang sama untuk menggulingkan kekuasaan orde baru. Kejenuhan

Kompas dengan terbatasnya akses informasi masyarakat yang diakibatkan penyempitan hak-hak berpendapat bagi pers ternyata sejalan dengan kejenuhan Megawati terhadap sikap otoriter pemerintah orde baru yang telah berkuasa 32 tahun.

Kesamaan misi inilah yang menjadi landasan utama Kompas selalu berusaha untuk membela PDI dari “serangan” pemerintah. Hal yang demikian menjadi bukti bahwa hubungan antara Kompas dengan Megawati memiliki *chemistry* yang terselubung.

Berbeda dengan Suara Karya yang dari awal didirikan hanya ditujukan menjadi sarana pemerintah agar bisa mengontrol rakyatnya dengan cara selalu membentuk opini positif terhadap pemerintahan orde baru. Berdasarkan hal tersebut tentunya Suara Karya bisa dikatakan tidak memiliki prinsip idealisme seperti Kompas sebagai landasan pemikirannya. Hal yang demikian tidak terlepas dari faktor politik terhadap pendirian pers Suara Karya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka wajar jika Kompas dengan Suara Karya selalu memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat satu peristiwa yang sama. Hal itu dibuktikan dengan perbedaan pemberitaan peristiwa 27 Juli 1996. Kompas memilih untuk bersikap rasional dan objektif, sedangkan Suara Karya memilih untuk satu suara dengan pemerintah orde baru terhadap kebijakan-kebijakannya.

Jacob Oetama dan PK. Ojong sebagai pemilik media pers Kompas tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir karyawan-karyawannya. Jabatannya yang memiliki peran penting terhadap berdirinya pers ini menjadikan kedua tokoh ini sebagai panutan bagi karyawan-karyawannya, terlebih lagi sikap-sikapnya yang terkesan rasional dan berpandangan objektif terhadap setiap peristiwa juga menjadi faktor pendukung sebagai pemimpin yang berpengaruh di Kompas.

Jacob Oetama dan PK. Ojong yang selalu menekankan kepada karyawan-karyawannya untuk selalu bersikap kritis, objektif, dan bertanggung jawab menjadikan pers ini terus mendapat kepercayaan dari rakyat. Hal itu berbeda dengan Suara Karya yang memang dari awal didirikannya hanya untuk memfasilitasi pemerintah dalam membentuk opini positif terhadap kebijakan-kebijakan orde baru.

Pada masalah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia hingga terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 menjadi bukti perbedaan visi dan misi dari pemilik masing-masing media pers ini terlihat jelas. Kompas dengan percaya diri memberitakan peristiwa yang memang benar terjadi misalnya, himbauan agar para pelaku peristiwa 27 Juli 1995 dijerat dengan hukuman sesuai pasal yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bukan menggunakan undang-undang subversif. Suara Karya ternyata memilih menerbitkan pemberitaan yang berbeda dari Kompas. Pers ini dalam pemberitaannya terkait tindakan hukum yang harus diterima oleh pelaku kerusuhan, aparat keamanan diperkenankan untuk menembak ditempat para aktivis

PRD yang dituduh sebagai pelaku. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia.

2. Independensi

Pendirian media pers Kompas oleh Jacob Oetama dan PK. Ojong terkesan tanpa adanya kepentingan-kepentingan politik. Kedua tokoh tersebut selalu menyatakan bahwa pendirian Kompas hanya berdasarkan faktor ekonomi, tujuan Kompas adalah untuk meraih keuntungan dalam bidang jurnalistik. Kompas dalam perkembangannya terkesan ingin menutupi *chemistry* yang terjalin dengan Megawati. Berdasarkan fakta yang ada Kompas terkesan selalu memberikan dukungan-dukungan terhadap Megawati yang terus di "serang" oleh pemerintah, hal ini dapat dibuktikan dengan pemberitaan-pemberitaan Kompas terkait peristiwa 27 Juli 1996 yang selalu memposisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya, pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini pasti akan mendapat simpatik dari masyarakat yang melihatnya. Kemungkinan kesamaan tujuan antara Kompas dengan Megawati untuk menggulingkan orde baru menjadi alasan kuat *chemistry* tersebut terjalin.

Pada peristiwa 27 Juli 1996 Kompas ingin menegaskan posisinya sebagai pihak profesional dan menutupi *chemistry* yang terjalin dengan Megawati. Hal ini didukung dengan pemberitaan-pemberitaannya selalu aktual, kritis, dan logis sesuai fakta, misal ketika memberitakan terkait upaya pencarian pelaku peristiwa 27 Juli 1996, hampir semua pers yang ada di Indonesia menyatakan PRD sebagai pelaku utama. Namun pada kenyataannya berita-berita yang diterbitkan Kompas terkait masalah tersebut tidak ada yang menyatakan PRD sebagai pelaku kerusuhan. Pemberitaan Kompas ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya keinginan untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki visi misi yang sama dengan Megawati untuk menggulingkan orde baru.

Kompas ternyata memilih untuk menerbitkan pemberitaan yang hanya menyatakan himbauan dari pemerintah kepada pelaku peristiwa 27 Juli 1996 serta ancaman hukuman yang akan diterima pelaku kerusuhan. Pers ini tidak ingin gegabah dalam menuduh pihak tertentu untuk bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di kantor DPP PDI Jakarta Pusat. Hal yang demikian tentu berbeda dengan pemberitaan yang diterbitkan oleh Suara Karya sebagai korannya pemerintah. Pers ini menerbitkan pemberitaan yang menyatakan dukungannya kepada Presiden Soeharto dengan menuduh aktivis-aktivis Partai Rakyat Demokratik sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Perbedaan pemberitaan yang terjadi antara Kompas dengan Suara Karya tentu tidak terlepas dari peranan pemerintah yang mengontrol penuh Suara Karya, sedangkan Kompas yang memiliki kesamaan misi dengan Megawati ingin selalu mendapat kepercayaan dengan cara memberikan pemberitaan yang aktual dan selalu rasional. Mayoritas pers pada

saat itu tidak berani untuk melawan intruksi-intruksi dari pemerintah yang berkuasa. Nampaknya hanya pers Kompas saja yang terlihat berbeda dengan pers lainnya, hal ini tidak terlepas dari peranan Jacob Oetama dan PK. Ojong yang kemungkinan memiliki *chemistry* dengan Megawati sehingga pemberitaannya selalu terkesan ingin melindungi pihak-pihak pendukung Megawati dari "serangan" pemerintah.

3. Kepentingan

Perbedaan pemberitaan terkait konflik internal PDI hingga terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 memunculkan fakta baru bahwa yang terjadi selama ini antara Kompas dengan Suara Karya memiliki tujuan yang saling bertentangan. Suara Karya sebagai korannya pemerintah ingin melindungi kekuasaan orde baru dengan selalu memberitakan bahwa pemerintah selalu benar dan tidak pernah salah. Berbeda dengan Kompas yang ternyata memiliki *chemistry* dengan Megawati menjadikan pers ini akan selalu melindungi Megawati dan para pendukungnya dari opini-opini negatif dari Suara Karya. Pertentangan misi antara Kompas dengan Suara Karya ini menjadikan pemberitaan-pemberitaan keduanya terkesan subjektif, meskipun dalam hal ini Kompas dalam pemberitaannya terkait peristiwa 27 Juli 1996 masih dalam taraf rasional sesuai fakta yang ada. Perbedaan kepentingan yang sangat terlihat jelas yakni misi dari kedua pers ini yang saling bertentangan, hal yang demikian menjadikan kedua pers ini saling "serang" opini di masyarakat.

Pemberitaan Kompas dengan Suara Karya meskipun saling bertentangan namun masyarakat Indonesia ternyata lebih memilih untuk membaca koran-koran terbitan Kompas dari pada terbitan Suara Karya. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan penyajian pemberitaan antara kedua pers ini yang berujung dengan kemenangan Kompas dalam mendapatkan pangsa pembaca di masyarakat. Suara Karya dalam menyajikan berita terkait peristiwa 27 Juli 1996 tidak bisa menyembunyikan kepentingan-kepentingan politiknya, pers ini terlalu cepat dalam menuduh pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut sehingga masyarakat sebagai pembaca terlalu jenuh melihat informasi yang terkesan subjektif. Berbeda dengan Kompas yang pintar dalam menyajikan berita terkait peristiwa 27 Juli 1996 dengan selalu memposisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya. Hal ini tentunya akan mendapat simpatik dari masyarakat yang membaca informasi tersebut, sehingga pada akhirnya Kompas mampu mengungguli Suara Karya dalam menguasai pasar informasi saat itu.

Keunggulan Kompas dalam mendominasi pasar informasi saat itu tentu akan berdampak terhadap indoktrinasi kepada masyarakat sebagai pembaca. Hal yang demikian dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap pemerintahan orde baru sehingga peringatan-peringatan kepada Kompas dari pemerintah terus dilakukan untuk mengantisipasi "tergusurnya" kekuasaan orde baru.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut perbedaan kepentingan antara Kompas dengan Suara Karya terjadi akibat misi dari kedua pers ini yang saling bertentangan. Suara Karya memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan orde baru, berbeda dengan Kompas yang memiliki kepentingan yang sama dengan Megawati yang ingin segera menggulingkan kekuasaan orde baru.

G. Dampak Keberanian Pemberitaan Kompas Berbeda dengan Suara Karya Terkait Peristiwa 27 Juli 1996

Kompas menjadi pers nasional yang sukses mendominasi pasar informasi pada masa orde baru. Pers ini terus berkembang pesat semenjak didirikan pada 28 Juni 1965. Perbaikan-perbaikan dalam penulisan berita yang dimuat selalu dilakukan untuk memenuhi keinginan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai pembaca. Oplah pertama Kompas tercatat sebanyak 4.800 eksemplar. Jumlah tersebut tidak terlalu buruk untuk pers yang tergolong baru di Indonesia. Pers ini hanya perlu tiga bulan untuk meningkatkan oplahnya hingga mencapai 8.000 eksemplar. Berdasarkan perkembangan tersebut Kompas menjadi pers yang memiliki potensi untuk mendominasi pasar informasi pada saat itu.³⁴

Posisi Kompas sebagai pers oposisi dari pemerintahan saat itu ternyata menjadi salah satu faktor yang membedakan pers ini dengan pers lainnya. Mayoritas pers pada saat itu lebih memilih untuk menjadi pers yang mendukung jalannya pemerintahan orde baru. Ancaman pembredelan oleh Menteri Penerangan nampaknya menjadi pemicu keputusan dari mayoritas pers saat itu untuk menjadi pers yang loyal kepada pemerintah. Tempo, DeTik, Editor menjadi korban pembredelan yang dilakukan oleh Menteri Penerangan yang dijabat Let. Jen. Ali Murtopo pada tahun 1994. Undang-undang kebebasan pers pada masa orde baru nampaknya disalah artikan oleh pemerintah. Pers pancasila yang ingin dibangun pemerintah pada saat itu menyatakan bahwa pers bebas berpendapat namun harus tetap bertanggung jawab, namun pihak pemerintah mentafsirkannya bahwa pers harus bertanggung jawab terhadap presiden bukan kepada rakyat. Hal yang demikian tentu akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membredel pers-pers yang dianggap membahayakan pemerintahan.

Kompas pada perkembangannya terkesan ingin menyembunyikan hubungan politiknya dengan pihak Megawati. Namun dari berbagai berita yang diterbitkan Kompas terkait peristiwa 27 Juli 1996 mulai bermunculan fakta-fakta bahwa Kompas terindikasi memiliki *Chemistry* dengan Megawati. Kompas selalu meemposisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya oleh pemerintah. Hal yang demikian tentu akan mudah untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat yang melihatnya. Dukungan dari

masyarakat ini berpotensi untuk melengserkan pemerintahan orde baru.

Sikap Kompas untuk selalu memposisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya oleh pemerintah ternyata mampu menarik masyarakat untuk membaca koran harian terbitan pers ini. Pemberitaan tersebut nampaknya mampu untuk menjadikan Kompas sebagai pers yang berpotensi untuk mendominasi pasar informasi pada saat itu. Kondisi yang demikian tentu mendapat sorotan dari pemerintah orde baru yang mulai merasa terusik dengan berita-berita yang diterbitkan Kompas terkait peristiwa 27 Juli 1996. Pemberitaan Kompas terkait peristiwa 27 Juli 1996 membuat pers ini mampu memperoleh kenaikan oplah hingga mencapai 500.000 eksemplar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari oplah sebelum tahun 1990-an yang hanya 100.000 eksemplar. Nampaknya pemberitaan Kompas terkait peristiwa 27 Juli 1996 menjadi keuntungan bagi Kompas yang mampu mengungguli oplah yang dihasilkan oleh Suara Karya sebesar 112.000 eksemplar pada periode yang sama.³⁵

Kesuksesan Kompas ini nampaknya tidak bisa diganggu oleh pemerintahan saat itu. Faktanya pers ini hanya diawasi oleh pemerintah tanpa adanya tindakan pembredelan. Pemerintah nampaknya tidak ingin gegabah untuk membrdel pers yang sudah mendapat respon positif dari rakyat. Hal yang demikian tidak terlepas dari kekhawatiran jika Kompas dibredel maka dukungan masyarakat yang besar untuk menentang keputusan tersebut dikhawatirkan berpotensi melengserkan pemerintah saat itu. Namun pemerintah yang memperoleh dukungan dari ABRI ini nampaknya telah mempersiapkan tindakan-tindakan represif jika Kompas ternyata semakin tidak terkendali untuk mengkritisi pemerintahan orde baru.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kebebasan pers di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pada masa orde baru perlu dipertanyakan. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang menggambarkan adanya ancaman pembredelan terhadap media pers yang diawali dengan "budaya telepon" sebagai simbol kekuasaan pemerintah orde baru. Selain itu juga peran ABRI yang memiliki fungsi menjaga kestabilan negara ternyata dimanfaatkan oleh pemerintah orde baru untuk meminimalisir munculnya pihak-pihak yang terlalu mengkritisi kebijakan-kebijakannya.

Kebebasan pers pada masa orde baru sesuai dengan teori otoritarian Fred S. Siebert yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat bagi para awak media serta reporter sudah ditiadakan karena terbentur dinding tinggi keotoriteran Pemerintah Orde Baru. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa pada saat itu pers tidak bisa secara rasional dan objektif

³⁴ Gibran, Ajidarma. 1997. *Peristiwa 27 Juli*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Institut Studi Arus Informasi. Hlm. 51.

³⁵Ibid. Hlm. 52-53.

dalam memberitakan sebuah peristiwa, hal ini disebabkan ancaman pembredelan dari Menteri Penerangan terhadap pers-pers yang dianggap “tidak patuh”.

“Budaya telepon” dapat dikatakan sebagai simbol kekuasaan pemerintah terhadap pers di Indonesia. Hal yang demikian itu menjadi faktor utama hanya terdapat segelintir pers yang berani bersikap kontra dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah orde baru. Dampak yang terjadi yakni pers selalu mengedepankan sisi subjektivitas dalam memberitakan sebuah peristiwa seperti kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli 1996.

Berdasarkan ancaman-ancaman tersebut Kompas dan Suara Karya teridentifikasi terjadi perbedaan sudut pandang dalam memberitakan kerusuhan 27 Juli 1996. Terdapat beberapa faktor utama yang mengakibatkan terjadi perbedaan tersebut seperti ideologi, pemilik media pers, independensi dan kepentingan masing-masing kedua pers tersebut.

Kompas yang didirikan oleh Jacob Oetama dan PK Ojong memilih untuk menerapkan prinsip idealisme yang tidak mudah terpengaruhi oleh pihak-pihak eksternal termasuk pemerintah saat itu. Hal ini dapat dibuktikan Kompas dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996. Pers ini cenderung mengedepankan sisi rasional dan objektifitas, berbeda dengan Suara Karya yang dari awal pendirian pers ini difungsikan sebagai media yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga sering disebut sebagai “korannya pemerintah”.

Jacob Oetama dan PK Ojong sebagai pemilik sekaligus pendiri Kompas yang memiliki keyakinan untuk menerapkan prinsip idealisme menjadikan pers ini selalu bersikap rasional, objektif, kritis, proporsional dan bertanggung jawab. Hal tersebut berbeda dengan Suara Karya yang didirikan oleh para tokoh-tokoh muda Partai Golkar menjadikan pers tersebut selalu berinisiatif untuk membela pemerintah dari tuduhan atas dugaan keterlibatannya pada peristiwa 27 Juli 1996.

Independensi dan kepentingan yang berbeda dari Kompas dan Suara Karya mampu mempengaruhi arah pemberitaan kedua pers tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, perbedaan Kompas dan Suara Karya dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 tidak terlepas dari perbedaan misi dari kedua pers ini. Suara Karya yang memiliki misi untuk mempertahankan kekuasaan orde baru dipastikan akan selalu memberitakan hal-hal yang positif terkait pemerintahan saat itu. Berbeda dengan Kompas yang ternyata memiliki misi yang sama dengan Megawati untuk melengserkan kekuasaan orde baru. Kompas memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 dengan selalu memosisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya oleh pemerintah. Hal yang demikian tentu akan mudah untuk mendapatkan simpatik masyarakat yang melihatnya. Dukungan dari masyarakat menjadi modal utama Megawati untuk melengserkan kekuasaan orde baru.

Kompas mulai jenuh dengan perkembangan informasi yang terlalu subjektif dan terkesan pro pemerintah. Hal yang demikian tentu akan berdampak terhadap kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terutama yang berkaitan dengan politik pada saat itu. Kejenuhan Kompas tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan kejenuhan Megawati terhadap sikap otoriter pemerintah orde baru terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya. Berbagai pihak yang dianggap berpotensi mengganggu kestabilan orde baru akan disingkirkan dengan beragam cara. Konflik internal PDI yang semakin tidak terkontrol menjadi bukti adanya keterlibatan pihak-pihak eksternal dalam upaya memperkeruh suasana konflik serta mengudeta Megawati sebagai ketua umum PDI periode 1993-1998.

Kesamaan misi tersebut menjadi alasan utama Kompas dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 terkesan selalu memosisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya oleh pemerintah. Hal yang demikian tentu menjadi penyebab perbedaan sudut pandang antara Kompas dengan Suara Karya dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996.

Sikap Kompas untuk berbeda dengan pers lainnya dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 membuat pers ini mampu untuk mendominasi pasar informasi pada saat itu. Simpatik masyarakat yang melihat Megawati sebagai pihak yang teraniaya oleh pemerintah memberikan keuntungan kepada pers ini dalam upaya meningkatkan oplah serta mengguguli pers-pers lainnya termasuk Suara Karya. Pemerintah yang mulai terusik dengan berita-berita yang diterbitkan Kompas ternyata memilih untuk tidak bisa membredel pers ini. Hal ini tidak terlepas dari posisi Kompas yang sudah mendapat simpatik dari mayoritas masyarakat Indonesia menjadi alasan pemerintah untuk tidak membredel pers ini. Nampaknya pemerintah memiliki kekhawatiran jika Kompas dibredel maka demonstrasi dalam jumlah yang besar akan terjadi di berbagai daerah. Hal ini tentu dianggap berpotensi mengganggu pemerintahan orde baru. Berdasarkan hal tersebut pemerintah yang mendapat dukungan dari ABRI memilih hanya untuk bersiaga jika Kompas semakin diluar kendali dalam mengkritisi pemerintah, tindakan represif akan dilakukan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan rezim orde baru.

2. Saran

Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Sabtu 27 Juli 1996 ini menjadi simbol kekacauan perpolitikan di Indonesia yang diawali dengan kekhawatiran berlebihan dari pemerintah orde baru dalam menghadapi pemilihan umum 1997. Hilangnya kebebasan pers saat rezim orde baru berkuasa menyebabkan timbulnya pemberitaan yang beragam atas peristiwa 27 Juli 1996, mayoritas pers pada saat itu memberitakan kerusuhan tersebut diprakarsai oleh aktivis-aktivis PRD. Namun salah satu pers yakni Kompas berani untuk bersikap rasional dan objektif dalam memberitakan kerusuhan itu sesuai fakta-fakta yang sebenarnya.

Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak terutama para petinggi-petinggi sebuah negara untuk saling introspeksi diri dan menghilangkan sifat egoisme agar bisa lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut tentunya agar sesuai dengan trilogi bangsa Indonesia yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Diharapkan agar masyarakat Indonesia bisa bekerja sama dengan pemerintah dan pers untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni penerapan sistem pemerintahan yang demokrasi. Cita-cita tersebut tentunya agar di masa depan Indonesia menjadi negara yang terbuka terhadap kritik maupun saran untuk menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

• KORAN

- Kompas. 17 Juli 1996. *Soerjadi Dekati Penentang Kongres PDI Medan*. hlm 1 kolom 2.
- Kompas. 18 Juli 1996. *Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid: Beri Kesempatan Soerjadi Untuk Lakukan Pendekatan*. hlm 1 kolom 6.
- Kompas. 19 Juli 1996. *Soerjadi Tidak Setuju "Status Quo"*. Hlm 1 kolom 3.
- Kompas. 21 Juli 1996. *Kassospol ABRI: ABRI Minta PDI Hentikan Mimbar Bebas*. hlm 1 kolom 2.
- Kompas. 23 Juli 1996. *Megawati Bertemu Jesse Jackson, Soerjadi ke NTT Untuk Sosialisasikan Hasil Kongres*. Hlm 1 kolom 3.
- Kompas. 27 Juli 1996. *Usai Diteima Presiden, Soerjadi Mempercepat Proses Konsolidasi*. Hlm 14 kolom 3.
- Kompas. 27 Juli 1996. *Usai Diterima Presiden, Soerjadi Mempercepat Proses Konlidasi*. Hlm. 14.
- Kompas. 30 Juli 1996. *Presiden Minta Penjelasan Enam Pejabat Tinggi*. Hlm 1 kolom 2.
- Kompas. 31 Juli 1996. *Mayat Suganda Ditemukan di Gedung Darmex*. Hlm 12 kolom 4.
- Kompas. 31 Juli 1996. *Pemerintah akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli*. Hlm 1 kolom 2.
- Kompas. 31 Juli 1996. *Pembuat Kerusuhan 27 Juli Sebaiknya Dijerat KUHP*. Hlm 13 kolom 5.
- Kompas. 31 Juli 1996. *Pemerintah akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli*. Hlm. 1 kolom 2.
- Suara Karya. 15 Juli 1996. *Soerjadi Harapkan Megawati Ikhlas Beri Kesempatan Kepada DPP PDI Hasil Kongres*. Hlm 1 kolom 8.
- Suara Karya. 15 Juli 1996. *Kelompok-kelompok Penggugat Pemeintah Dinilai Sudah Melewati Batas*. Hlm 1 kolom 8.
- Suara Karya. 23 Juli 1996. *Pangab: Mimbar Bebas Gunakan Cara-cara PKI*. Hlm 1 kolom 7.
- Suara Karya. 23 Juli 1996. *Pangab: Mimbar Bebas Gunakan Cara-cara PKI*. Hlm 1 kolom 7.
- Suara Karya. 23 Juli 1996. *DPP PDI Ambil Alih Kantor Jalan Diponegoro 58 Dengan Cara Apapun*. Hlm 3 kolom 1.
- Suara Karya. 26 Juli 1996. *Soerjadi dkk Diterima Presiden*. Hlm 1 kolom 3.
- Suara Karya. 26 Juli 1996. *PDI Harus Lebih Giat Lagi Lakukan Konsolidasi*. Hlm 1 kolom 1.
- Suara Karya. 28 Juli 1996. *Soerjadi Siap Kerja Sama dengan Megawati*. Hlm 1 kolom 3.
- Suara Karya. 30 Juli 1996. *Kerusuhan di Jakarta Ditunggangi PRD*. Hlm. 1
- Suara Karya. 30 Juli 1996. *Kerusuhan di Jakarta Ditunggangi PRD*. Hlm 1 kolom 1.
- Suara Karya. 30 Juli 1996. *Golkar Keccam Keras Pelaku Kerusuhan, MUI Minta Umat Tingkatkan Kewaspadaan*. Hlm 1 kolom 1.
- Suara Karya. 31 Juli 1996. *Tembak di Tempat Terhadap Perusuh !*. Hlm 1 kolom 1.
- Suara Karya. 31 Juli 1996. *Aparat Keamanan Sudah Cukup Bersabar*. Hlm 1 kolom 5.
- Suara Karya. 31 Juli 1996. *Struktur Partai Rakyat Demokratik Sama Dengan PKI*. Hlm 1 kolom 8.

• MAJALAH

- Majalah Gatra. *Ia Ingin Mengganti Pemerintah, Dalam Pemeriksaan, Budiman Sudjatmiko Mengaku PRD Ingin Membentuk Pemerintah Koalisi*. Edisi 21 Desember 1996.
- Majalah Tempo Interaktif edisi Maret 1996 – Agustus 1996.

• BUKU

- Ajidarma, Gibran. 1997. *Peristiwa 27 Juli*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Institut Studi Arus Informasi.
- Heri, Zulfan, 2005. *Jalan Berliku Menuju Puncak Sebuah Biografi H. Syarwan Hamid (Kisash Sukses Anak Daerah di Pentas Nasional)*. Pekanbaru: Indonesian Society For Democracy And Peace.
- Hill, David T. 1994. *The Pers in New Order Indonesia*. Asia Research Centre on Social, Politik and Economic Change.
- Mallarangeng, Rizal. 2010. *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Sjamsuddin, Heliuss. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soebagjo. 1997. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sudibyso, Agus. 2006. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Lkis.
- Sudjatmiko, Budiman. 2013. *Anak-anak Revolusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1980. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Syah, Sirikit. 2014. *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media Sorotan Atas Produk dan Perilaku Media di Era Demokrasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wiryanto. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.